

Peneliti AS Temukan Obat Bius yang Dapat Ringankan Gejala Depresi dan Pemikiran Bunuh Diri

Ketamin dapat ringankan gejala penderita depresi yang resisten terhadap antidepresan.

JAKARTA(AM)-Ketamin merupakan obat bius yang bisa digunakan di rumah sakit. Akan tetapi, obat ini juga kerap digunakan secara ilegal sebagai obat rekreasi.

Selama bertahun-tahun, beragam spesialis menyadari bahwa obat ini bisa membantu sebagian orang dengan depresi. Hal ini mendorong dilakukannya sebuah studi yang

melibatkan 424 partisipan.

Seluruh partisipan yang terlibat merupakan pasien depresi yang mengalami resistensi terhadap pengobatan. Mereka sudah pernah menjalani berbagai terapi pengobatan depresi, namun tak memberikan respons yang baik.

Melalui studi ini, para partisipan diberikan ketamin melalui infus di beberapa klinik yang berada di Virginia, AS. Mer-

eka menerima enam dosis infus ketamin dalam waktu tiga pekan.

Setelah enam pekan berlalu, setengah dari para partisipan memberikan respons terhadap terapi tersebut. Sebanyak 20 persen partisipan mengatakan gejala depresi mereka tak lagi kambuh atau memasuki tahap remisi.

Setelah infus kesepuluh, persentase partisipan yang memberikan respons terhadap pengobatan adalah 72 persen. Selain itu, tingkat remisi yang dicapai para partisipan mencapai 38 persen.

Tak hanya itu, sekitar 50 persen partisipan yang memiliki pemikiran untuk bunuh diri

juga berhasil mencapai remisi. Remisi ini tercapai pada pekan keenam setelah menjalani pengobatan dengan ketamin.

Terapi dengan ketamin juga tampak membantu sebagian pasien dengan gangguan keemasan. Penurunan gejala keemasan setelah terapi menggunakan ketamin adalah 30 persen.

“Ketamin efektif dalam menurunkan gejala pikiran bunuh diri, depresi, dan kecemasan,” ujar tim peneliti, seperti dilansir WebMD, Rabu (14/9).

Jason Anthony merupakan pria berusia 52 tahun yang menjadi salah satu partisipan dalam studi ini. Sebelumnya, Anthony mengatakan depresi

membuat dirinya sulit untuk beranjak dari tempat tidur. Akan tetapi, hal ini berubah sejak dia menjalani terapi menggunakan ketamin.

Ketua tim peneliti, Patrick Oliver, mengatakan studi ini menunjukkan bahwa ketamin memiliki potensi untuk membantu orang-orang dengan depresi dan pemikiran bunuh diri. Oliver menilai depresi sebagai sebuah epidemik yang telah berlangsung lama dan perlu diatasi.

“Dan kami menemukan sebuah obat yang sungguh-sungguh murah untuk dibuat dan bisa membantu para pasien,” kata Oliver. ● **tom**

SAMBUNGAN

“Saya yakin bahwa yang disampaikan Pak Effendi Simbolon tidak mewakili anggota dewan. Apalagi mewakili partainya, setahu saya PDI Perjuangan itu betul-betul sangat dekat dengan TNI AD, selalu perhatian kepada wong cilik,” katanya.

Saya Tak Judge TNI

Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, mengesakan dirinya bertanggung

Dudung Respons Effendi Simbolon...

jawab atas pernyataannya yang diprotes TNI AD. Dia bersumpah dirinya tak bermaksud men-stigma TNI sebagai gerombolan.

“Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab apa yang menjadi sikap yang saya sampaikan dan itu pertanggungjawaban saya ke Tuhan,” kata Effendi dalam jumpa pers di ruang rapat Fraksi PDI Perjuangan, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta

Pusat (Jakpus), Rabu (14/9).

“Saya juga punya kehormatan. Kehormatan saya akan saya bawa sampai ke pusara saya,” sambung Effendi.

Effendi Simbolon kembali meminta maaf. Dia menekankan tujuan dirinya menanyakan disharmoni antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, karena khawatir kondisi ini meng-

Ganggu kerja TNI dan jajaran. “Saya akan pertanggungjawabkan itu. Tapi sekali lagi misi saya datang untuk memintakan maaf. Saya sudah sampai ke Pak Panglima. Memang ke Pak KSAD belum langsung, karena belum ada waktu beliau,” tutur Effendi.

“Dan ini saya terima kasih kepada Pak Ketua memfasilitasi ini. Bagaimanapun saya bukan pengimil kebenaran. Saya hanyalah menyampaikan apa yang ingin saya dapatkan penjelasan di forum rapat itu,

tentang adanya disharmoni yang mengganggu TNI,” sambung Effendi.

Dia memungkas dirinya juga merupakan bagian dari keluarga besar TNI, karena dirinya adalah anak dari seorang prajurit berpangkat letnan kolonel (letkol).

“Sekali lagi, demi Allah, demi Tuhan saya tidak pernah men-judge sebagaimana yang beredar, apalagi saya sendiri juga bagian dari keluarga besar TNI,” pungkas Effendi. ● **pp**

DARI HAL 1

Sebelumnya, muncul wacana Jokowi menjadi wakil presiden pada 2024. Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan, Jokowi sangat mungkin jadi cawapres jika ada partai yang mengunggahnya di pemilu. ● **pra**

Tak Elok Jika Jokowi Jadi Wapres...

presiden, merusak marwahnya,” tutur Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas itu.

Selain itu, lanjut Feri, Undang-Undang Dasar 1945 secara tersirat melarang presiden yang sudah menjabat dua periode mencalonkan diri sebagai wapres. UUD memang tak mengatur secara gamblang bahwa presiden yang sudah

menjabat dua periode dilarang mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Pasal 7 UUD hanya menyebutkan, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Namun, kata Feri, konstitusi mengamanatkan bahwa

jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka harus digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya.

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 8. Berangkat dari Pasal 7 dan Pasal 8 itu, maka, presiden yang sudah pernah menjabat dua periode tidak

boleh menjadi wakil presiden. “Di titik ini tentu jadi masalah serius karena begitu presiden mangkat, lalu presidennya yang telah dua periode secara konstitusional dia akan otomatis melanggar pembatasan masa jabatan,” kata Fery.

Fery mengatakan, pasal-pasal dalam konstitusi saling berkaitan. Oleh karenanya, Pasal 7 UUD tidak bisa dibaca

sendiri tanpa mengaitkan dengan pasal-pasal lainnya.

Sebelumnya, muncul wacana Jokowi menjadi wakil presiden pada 2024. Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan, Jokowi sangat mungkin jadi cawapres jika ada partai yang mengunggahnya di pemilu. ● **pra**

Turis Kencing Gunung Bromo...

edukasi sebaik mungkin agar perilaku tercela itu tak terulang kembali. Karena, begitu banyak komentar yang menginginkan proses lanjutan pada turis itu.

“Kita akan sampaikan kepri-

hatinan kita atas kejadian tersebut kepada yang bersangkutan. Ke depan kita akan berupaya edukasi baik melalui media sosial maupun lainnya. Diharapkan bisa efektif dan menambah wa-

wasan pengunjung Bromo dan sekitarnya,” jelas dia.

Aksi turis berbahasa Jerman terang-terangan mengencingi Gunung Bromo itu diunggah dalam Instagramnya, @home-

town.earth. Karena perilakunya itu, ia mendapat murka dari warganet. Dalam bio di akunnya itu, ia akan kembali ke Wina, Austria dalam waktu dekat. Karena ulahnya itu, ia kini

telah menghapus atau mungkin mengarsipkan postingan yang mengundang kontroversi itu dan keterangan di bio. Tak hanya itu, kolom komentar juga telah dimatikan. ● **yan**

Honor Ketok Palu Hakim Agung...

dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Dalam Pasal 13 ayat 1 disebutkan:

Hakim Agung diberikan honorarium dalam hal:

- penanganan perkara pada Mahkamah Agung; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. “Ketentuan pemberian honorarium bagi Hakim Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) diatur dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung,” demikian bunyi Pasal 13B ayat 1.

Selain mendapatkan hon-

or ketok palu, hakim agung mendapatkan pendapatan bulanan (gaji dan tunjangan).

Ketua MA-Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat penghasilan Rp 121 juta. Sedangkan wakilnya memperoleh Rp 82 juta. Adapun Ketua Muda MA mendapat gaji Rp 78 juta. Se-

dangkan hakim agung/hakim konstitusi Rp 72 juta per bulan.

Lalu, berapa jumlah volume perkara yang diadili para hakim agung? Berdasarkan Laporan Tahunan MA 2020, pada 2020, MA mengadili sebanyak 20.562 perkara yang telah diputus dari total perkara

yang ada, yaitu 20.761 perkara.

Bila satu majelis mendapatkan honor Rp 3,25 juta, dalam setahun sedikitnya hakim agung mendapatkan Rp 65 miliar dari mutus perkara. Bila ada 50 hakim agung, tiap hakim agung mendapatkan honor ketok palu Rp 1,3 miliar per tahun. ● **yan**

Peti Mati Ratu Elizabeth II...

Prosesi pemakaman Ratu Elizabeth akan berlangsung selama 7 hari ke depan, dengan penghormatan senjata dan lonceng yang direncanakan dari Big Ben menjelang hari pemakaman pada 19 September 2022.

Seperti Pangeran Philip, sang Ratu akan dimakamkan di peti mati kayu ek yang dirancang untuknya lebih dari

30 tahun yang lalu, dengan berat satu ton, karena dilapisi dengan timah.

Anggota keluarga kerajaan Inggris sudah dikenal dimakamkan di peti mati berlapis timah untuk tujuan pengawetan jenazah, termasuk untuk peti mati Ratu Elizabeth II.

Dikutip dari Mental Floss, hal ini karena lapisan timah dapat menyegel peti mati

luarkan. Peti ini juga memungkinkan sehingga tak ada bau yang dikeluarkan selama proses pembusukan.

Ketika Putri Diana meninggal pada tahun 1997, peti matinya juga berisi lapisan khusus ini, itulah sebabnya beratnya hampir 244 kg.

Sama halnya seperti tidak ada udara yang bisa masuk, tidak ada juga yang bisa dixe-

seniman yang dihormati seperti George Frideric Handel.

Ternyata dalam beberapa kasus, mereka mungkin memindahkan peti mati ke tempat lain. Ini yang terjadi pada Putri Alice, ibu Pangeran Philip. Jadi tentunya mereka tidak menginginkan bau busuk tercium dari peti mati, termasuk peti mati Ratu Elizabeth II. ● **yan**

seniman yang dihormati seperti George Frideric Handel.

Ternyata dalam beberapa kasus, mereka mungkin memindahkan peti mati ke tempat lain. Ini yang terjadi pada Putri Alice, ibu Pangeran Philip. Jadi tentunya mereka tidak menginginkan bau busuk tercium dari peti mati, termasuk peti mati Ratu Elizabeth II. ● **yan**

Menkopolkum: Belum Ada...

tenang karena sebenarnya sampai detik ini belum ada rahasia negara yang bocor,” kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolkum, Jakarta, Rabu (14/9).

Setelah berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan,

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Mahfud menyampaikan bahwa data yang diretas dan dibocorkan ke dunia maya merupakan data bersifat umum. Ia menambahkan, dugaan motif dari peretasan Bjorka itu pun tidak membahayakan.

Kendati demikian, Mahfud

menegaskan pemerintah tetap serius dalam menangani kasus tersebut. Selain itu, berdasarkan koordinasi tersebut, lanjutnya, dapat disimpulkan pula bahwa Bjorka tidak memiliki keahlian ataupun kemampuan membobol.

Menurut Mahfud, apa yang dilakukan Bjorka perlu dipahami sebagai pengingat bahwa seluruh warga negara

Indonesia (WNI) harus berhati-hati dalam melindungi data pribadi masing-masing. “Hasil dari kesimpulan kami, apa yang dilakukan Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh. Dia hanya hendak memberitahu kepada kita kalau kita harus hati-hati, (data) kita akan bisa dibobol, dan

sebagainya,” jelasnya.

Sebelumnya, Bjorka menjadi topik perbincangan publik karena mengklaim telah berhasil meretas sejumlah data rahasia, mulai data penduduk Indonesia, data pengganda kartu SIM, data pribadi Menteri Kominfo Johnny G Plate, serta data dokumen rahasia milik Presiden Joko Widodo. ● **pra**

Pakar: Sambo Berpeluang Terhindar...

Menurut Azmy, semestinya sudut pandang dan sikap penyidik maupun jaksa melihat perbuatan Sambo dan fakta hukum tersebut, harus diartikan sebagai suatu perilaku yang diarahkan hanya pada satu tujuan, adanya perbarengan ide, persamaan sifat dari perbuatan yang dilakukan, yang mana karakteristik perbuatan ini harus dijadikan sebagai hal yang memberatkan pidananya. Karena itu, yang harus diadili dulu adalah perbuatan yang ancaman pidananya lebih tinggi, dalam hal ini perkara pembunuhan berencana.

Jadi, kata dia, bila seandainya perkara obstruction of justice lebih dulu disidangkan, dapat saja tujuannya agar FS dapat sanksi pidana lebih dulu. Sehingga, di kasus persidangan pembunuhan tidak dapat lagi dijatuhi pidana maksimal.

“Ini karena pada pengadilan sebelumnya dalam hal ini perkara obstruction of justice yang lebih dulu diajukan sudah ada pemidanaan, sehingga bisa saja nantinya FS terhindar dari pidana mati dan seumur hidup,” kata Azmy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/9).

Jika ini terjadi, menurut

Azmy, sama saja dengan menghindari pidana maksimum sekaligus penyelundupan hukum dan ini tidak berdasarkan asas due process of law. Bila suatu proses peradilan yang dilakukan tidak menurut hukum adalah batal demi hukum, maka ini patut diduga ada alasan tersembunyi lain.

Misalnya, apakah adanya kekuatan tangan yang tidak terlihat (invisible hand). Karena, jika Sambo tidak dibantu dikhawatirkan dia akan membongkar fakta yang lebih besar, sehingga ada pihak-pihak lain yang khawatir.

Pihak-pihak lain ini, ujarnya, mereka yang ikut mendapatkan manfaat dari kinerja Sambo selama menjabat di kepolisian. Atau ada peristiwa lainnya yang melibatkan pihak lain yang berfungsi sebagai pengendali kontrol.

Apalagi diketahui, kasus ini, sejak awal bermuatan rekayasa kasus, bersifat impersonal, dan pelakunya massal yang ditandai dengan ada juga penyimpangan perilaku organ personel organisasi. Di mana penegak hukum malah menjadi pelanggar hukum tentunya akan ada hambatan, ditemu-

kan tingkat kesulitan tinggi (delicacy). “Karenanya tidak mudah melakukan tindakan bersih-bersih secara tuntas,” ucap dia.

Tentunya, kata Azmy, FS sudah memperkirakan keadaan ini secara cermat. Setidaknya, dia masih dan bisa ‘jadi ancaman’ karena bisa mengungkap fakta dan diduga memegang beberapa data, alat bukti.

“Seolah dia punya kartu truf dan karenanya pula bisa jadi dia nantinya jalani pemidanaan sampai berkekuatan hukum tetap hanya di tahanan Mako Brimob,” kata Azmy. ● **osm**

Pemerintah Didesak Buat Regulasi Terkait Distribusi Tenaga Kesehatan Lebih Merata

JAKARTA(AM)-Ketimpangan jumlah dan kualitas dokter di berbagai daerah masih menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan Indonesia. Terlebih pada pelayanan kesehatan primer

Pasalnya, yankes primer menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kapasitas dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan bukan lagi menjadi faktor pendukung, tetapi menjadi penentu kualitas pelayanan.

Dalam keterangannya, Rabu, (14/9), dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG.(K), tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini lulusan kedokteran memiliki kualifikasi beragam, yang pada akhirnya mendilusi kualitas pelayanan kesehatan primer. Ia pun berpendapat dibutuhkan solusi jitu dalam menjawab berbagai tantangan tersebut.

Belum lagi adanya permasalahan dilematis yang kerap dialami dokter, yaitu pertimbangan antara pengabdian dan orientasi pencapaian diri. Konflik batin semacam ini menjadi tidak terhindarkan.

Dokter yang tekun dan mau melayani masyarakat sepenuhnya sebagai seorang provider sekaligus manajer di Puskesmas tidak lebih dari 10 persen. Ini tantangan kita untuk memajukan layanan primer,” ungkap dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG.(K).

Dilema ini juga menurut Hasto harus menjadi perhatian pemerintah karena ada sebuah kegentingan dalam pemerataan pelayanan, dengan jumlah tenaga dokter yang tidak mencukupi. Dikatakan Hasto, dibutuhkan kesadaran, empati, dan

idealisme pelayanan sebagai sebuah sikap nasionalisme para dokter sejak awal.

Perihal pentingnya pemenuhan kuota dokter sebagai provider kesehatan, beberapa waktu lalu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengutip data Kemenkes 2022, menyebutkan perbandingan jumlah tenaga kesehatan termasuk spesialis dengan populasi di Indonesia adalah 0,68 per 1000 populasi.

Bandingkan dengan standar yang ditetapkan World Health Organization, yakni 1 tenaga kesehatan untuk 1.000 populasi. Angka ketersediaan tenaga kesehatan Indonesia juga masih di bawah standar negara-negara Asia yang 1,2 per 1.000, atau bahkan negara-negara OECD atau Eropa yang jauh lebih baik di angka 3,2 per 1.000 populasi.

Beruntung, lanjut Hasto, hingga saat ini sebagian besar publik masih meyakini bahwa dokter adalah profesi yang mulia dan terhormat.

“Animo masyarakat dan para orang tua terhadap pendidikan kedokteran pun masih sangat tinggi, sehingga dorongan untuk menggeluti profesi bidang kesehatan masih sangat besar. Situasi ini tentu bisa menjadi momentum yang bisa dimanfaatkan pemerintah untuk mencetak lulusan dokter terbaik,” ujar mantan bupati dua periode di Kulon Progo, Jawa Tengah ini.

Harapannya, kata Hasto, pada akhirnya pemerintah tak hanya mampu memenuhi kuota dokter sebagai provider kesehatan, tapi juga memastikan kesamaan kualitas setiap dokter yang dicetak.

“Sehingga jargon Ethos, Logos, dan Pathos bagi para pelayan kesehatan seperti yang disampaikan Aristoteles dapat diamalkan oleh semua dokter,” imbuhnya. ● **tom**

Cegah Angka Stunting Terus Meningkat, BKKBN Beri Edukasi Tambahan untuk Para Bidan

JAKARTA (AM) - Stunting menjadi salah satu masalah kesehatan serius di Indonesia. Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 Kementerian Kesehatan pada 2021 tercatat prevalensi stunting di Indonesia masih sebanyak 24,4 persen.

Jumlah itu masih berada di atas batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 20 persen. Juga masih jauh dari target Presiden Joko Widodo yang meminta stunting turun hingga di bawah 14 persen.

Stunting merupakan kondisi ketika balita memiliki tinggi badan di bawah rata-rata juga kecerdasannya kurang akibat asupan gizi yang didapatkan dalam waktu panjang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Untuk mencegah bertambahnya jumlah anak yang stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meng-

gandeng platform aplikasi Teman Bumil khusus untuk bidan yang akan mendampingi para ibu hamil.

Langkah itu dilakukan, karena stunting sebenarnya bisa dicegah sejak anak masih dalam kandungan. Caranya

dengan memastikan gizi ibu hamil selalu tercukupi. Sehingga janin juga mendapatkan asupan yang tmbuh dan berkembang. Bersama Dexa Group dan Argon Group juga, diluncurkan program Pendampingan Bidan Pendamping Keluarga pada Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Sebanyak 1.000 bidan mendapatkan edukasi dan intervensi stunting di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. “Kita akan melanjutkan ke kota-kota lain yang tentunya masih sangat membutuhkan program-program yang sangat intensif untuk menurunkan angka stunting,” kata Presiden Direktur Dexa Medica Hery Sutanto.

Bidan dianggap memang memiliki peranan sangat krusial dalam penurunan angka stunting. Karena mereka menjadi tenaga medis yang biasanya paling dekat dengan ibu hamil hingga anaknya mencapai usia lima tahun.

Dikatakan Chief Strategy Officer Teman Bumil Ruth Retno Dewi bahwa aplikasi Teman Bumil telah menjadi teman setia hampir 3,5 juta ibu di Indonesia sejak tahun 2017 dengan memfasilitasi para bidan agar mudah memberikan edukasi seputar pencegahan stunting. ● **tom**

InternationalMedia

PEMIMPIN REDAKSI: Osmar Siahaan
PELAKSANA HARIAN: Lusi J, Prayan Purba.
PENANGGUNG JAWAB: Bambang Suryo Sularto.
KORDINATOR LIPUTAN/FOTO: Sukris Priatmo.
REDAKSI : Frans G, Vitus DP, Berman LR, Bambang Suryo Sularto.
ARTISITIK : M Rifki, James Donald, Indra Saputra.
SIRKULASI-PROMOSI : A Susanto, Nurbayin, Slamet, Ahyar, Ferry.
AGEN: JOGJA (Hidup Agency), **PADANG** (Karel Chandra), **PALEMBANG** (Angkasa), **SOLO** (ABC), **BELITUNG** (Naskafa Tjen). **PANGKAL PINANG** (Yuliani, John Tanzi), **BALIK-PAPAN** dan **SAMARINDA** (Cv Gama Abadi, Alan/Tatang), **MAKASSAR** dan **MANADO** (Jefri/Meike, Jemmy), **TARAKAN KALTIM** (Ali), **BALI** (Swasti), **PEKANBARU** (Bob), **LAMPUNG** (Kartika), **SURABAYA, MEDAN** dan **PONTIANAK**.
KUANGAN/IKLAN: Citta.
BIRO BOGOR: Subagiyo (Kepala Biro), Jaidarman.
BIRO TANGERANG: Johan (Kepala Biro).
BIRO BEKASI: Madong Lubis (Kabiro),
BIRO SEMARANG: Tri Untoro.
BIRO BANDUNG: Lyster Marpaung.
BIRO BANTEN: Drs H Izul Jazuli (Kepala Biro), Stefano (Koordinator Berita Serang, Pandeglang dan Lebak), Arafik.
BIRO BEKASI: Nofi Agustina (Kabiro).
BIRO JAMBI : Ratumas Sabar Riah, Rts Zuchriah.
HARGA ECERAN : Rp 2.500,-/eks (di luar kota Rp 3.000,-/eks), Harga Langganan Rp 50.000,-/Bulan.
PERCETAKAN : PT. Internasional Media Promosindo
ALAMAT: Jl. Kapuk Kamal Raya No. 40-A, Jakarta Barat. (isi di luar tanggung jawab percetakan).

Alamat Redaksi/Iklan : Gedung Guo Ji Ribao Lt 3
 Jalan Gunung Sahari XI No. 291 Jakarta Pusat 10720
 Telp : 021-6265566 pesawat 4000
 Fax : 021-639 7652.
 Twitter: International Media @redaksi_IM